

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecurangan akuntansi akhir-akhir ini semakin sering terjadi di Indonesia, baik di sektor swasta maupun sektor pemerintahan. Thoyibatun (2009) menjelaskan bahwa pada sektor swasta kecurangan terjadi pada ketidaktepatan dalam membelanjakan sumber dana, sedangkan pada sektor pemerintahan kecurangan terjadi dalam bentuk kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kecurangan akuntansi akan menyebabkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang nyata atau sebenarnya.

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindakan kecurangan akuntansi. Soepardi dalam Fauwzi (2011) menyatakan bahwa Kecurangan akuntansi dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminologi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari fakta- fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan, dan omisi fakta kritis.

Berdasarkan *database* Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, jumlah kasus korupsi yang terjadi di Jawa Tengah tahun 2013 berjumlah 222 kasus. Jumlah tersebut naik 7 kasus dari tahun 2012 yang berjumlah 215 kasus. Kasus korupsi yang sering muncul antara lain yang berkaitan dengan APBD, buku ajar, bansos serta hibah dan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah (Metrotvnews.com/7)

Januari 2014) dalam Rahmaidha (2016:1).

Salah satu kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah Tingkat II adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh FRY, mantan Walikota Magelang periode 2000 – 2010. FRY menerima aliran dana yang tidak seharusnya digunakan, yaitu dana bantuan sosial untuk subsidi uang muka pembelian kios dan los pedagang Pasar Gotong Royong tahun 2007. Dana bantuan sosial sebesar Rp2.827.000.000,00 tersebut seharusnya dicairkan pada saat pembangunan pasar mencapai 70%, namun saat PT. Yoga Sakti sebagai pelaksana pembangunan pasar baru menyelesaikan 51% pembangunan, dana bantuan sosial tersebut sudah dicairkan. Pencairan dana tersebut berdasarkan nota dinas yang diterbitkan oleh SRN selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Magelang. Dana yang telah dicairkan tersebut, tidak disalurkan kepada pedagang, melainkan ditampung di rekening Bendahara Pembantu, SDW. Dana tersebut kemudian dialirkan kepada FRY dengan bukti kuitansi penerimaan atas nama SR yang dibubuhi paraf FRY (suaramerdeka.com/4 Februari 2013) dalam Rahmaidha (2016: 2).

Kasus korupsi lain yang terjadi di Pemerintahan Kota Magelang adalah tindak pidana korupsi Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemerintah Kota Magelang tahun 2012, senilai Rp. 601.070.250,00 yang dilakukan oleh ASH selaku staf bagian PAD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Magelang. Korupsi dilakukan dengan modus memproses sendiri pajak yang dibayarkan Wajib Pajak (WP) tanpa melalui Manual Pendapatan Daerah (Mapada). Caranya dengan memalsukan tanda tangan

atasan dan Bendahara DPPKD (entitashukum.com/10 Maret 2015) dalam Rahmaidha (2016: 2).

Kecurangan dalam akuntansi disebabkan adanya tiga kondisi yang biasa disebut dengan *Fraud Triangle* (Segitiga Kecurangan) (Arens, 2008: 432), yaitu insentif/tekanan kesempatan dan sikap/rasionalisasi. Insentif/tekanan yang dirasakan oleh seseorang menyebabkan orang tersebut melakukan tindak kecurangan. Dalam hal ini, kesempatan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang memberikan celah atau kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan, sedangkan sikap/rasionalisasi adalah sebuah sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membenarkan seseorang melakukan suatu tindak kecurangan atau orang tersebut berada pada lingkungan yang menekan sehingga merasionalisasi tindak kecurangan.

Kecurangan akuntansi di instansi pemerintah dapat diantisipasi diantaranya dengan pengendalian internal. Halim (2003: 197) dalam Rahmaidha (2016: 3). Menyatakan bahwa struktur pengendalian internal merupakan berbagai macam kebijakan dan prosedur yang dilakukan secara sistematis oleh entitas yang bertujuan agar keandalan pelaporan keuangan entitas, efektivitas dan efisiensi operasi yang dijalankan entitas serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan tetap terjaga.

Pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018, BPK melakukan pemeriksaan terhadap 700 objek pemeriksaan yang terdiri dari instansi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. BPK menemukan 7.539 kasus yang berhubungan dengan lemahnya Sistem Pengendalian Internal (bpk.go.id/ihaps/ 8 Juli 2019).

Hasil evaluasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pengendalian internal di pemerintahan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan pemerintahan. Pengendalian internal bertujuan dapat meminimalisir tingkat terjadinya asimetri informasi, sehingga semakin tinggi tingkat kepatuhan pegawai pengendalian internal maka memberikan presentase semakin rendah tingkat terjadinya kecurangan (fraud) akuntansi di OPD. Akan tetapi pada 6/12/2018 KPK menetapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik untuk DPC PPP Kabupaten Jepara tahun 2011-2014. (m.cnnindonesia.com/6 Desember 2019).

Berdasarkan uraian di atas, Sistem Pengendalian Internal yang lemah masih banyak terjadi pada instansi pemerintah. Ketidakefektifan pengendalian internal dapat memicu terjadinya kecurangan akuntansi. Adanya pengendalian internal yang efektif dalam suatu instansi, diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan yang dapat merugikan instansi.

Rahmaidha (2016) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecurangan Akuntansi Pada OPD di Kota Magelang. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara Keefektifan Pengendalian Internal terhadap Kecurangan Akuntansi. Selain dampak negatif yang telah dibahas di atas, keefektifan pengendalian internal terhadap Kecurangan juga memiliki dampak positif diantaranya yaitu menurut Wilopo (2006) dalam Pramudita (2013: 37) bahwa sistem pengendalian internal bagi sebuah organisasi sangatlah penting, yaitu untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Adanya suatu sistem pengendalian intern yang baik oleh instansi maka akan menurunkan tingkat kecurangan yang akan dilakukan, sebaliknya jika kualitas sistem pengendalian intern yang buruk, maka hal itu akan menjadi kesempatan bagi karyawan untuk melakukan *fraud* pada instansi tersebut. Maka semakin baik pengendalian intern di dalam suatu instansi akan semakin rendah tingkat terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

Faktor lain yang dapat mencegah terjadinya kecurangan akuntansi adalah ketaatan aturan akuntansi. Suatu laporan keuangan dinyatakan menaati aturan akuntansi jika menerapkan pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip yang tertuang dalam standar akuntansi. Rahmawati (2012: 19) dalam Rahmaidha (2016) menyatakan bahwa standar akuntansi disusun untuk menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi tersebut terdiri atas pedoman-pedoman yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dalam hal ini, penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan pemerintah harus menggunakan pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip yang tertuang dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Shintadevi (2015) dalam Rahmaidha (2016) menunjukkan bahwa Ketaatan Aturan Akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecurangan Akuntansi. Artinya semakin tinggi ketaatan instansi pada aturan akuntansi, maka akan semakin rendah kecurangan akuntansi yang dilakukan pegawai pada instansi dan hasil penelitian dari Kahar, dkk. (2018) menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kecurangan Akuntansi. Adanya aturan akuntansi tersebut, untuk menghindari tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan instansi. Apabila pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan peraturan atau standar akuntansi yang berlaku, maka kondisi ini akan memungkinkan seorang bendahara melakukan tindakan kecurangan yang akan merugikan instansi tersebut.

Komitmen organisasi mengarah pada asersi setiap pegawai yang mempunyai tujuan mempertahankan organisasi. Robbins & Judge (2008) dalam Sumbayak (2017), mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasi, pegawai tersebut cenderung tidak akan melakukan hal-hal yang bisa saja menghambat tercapainya tujuan organisasi, sebaliknya, jika pegawai memiliki komitmen yang rendah terhadap organisasinya, maka pegawai cenderung akan melakukan hal-hal yang menghambat tercapainya tujuan organisasi demi tujuan pribadinya sendiri Najahningrum (2013).

Pristiyanti (2012) dalam Widiutami, dkk. (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan

(fraud) memiliki komitmen yang tinggi terhadap instansi berarti pegawai juga memiliki dedikasi yang tinggi terhadap instansi. Adapun komitmen organisasi terhadap kecurangan juga terdapat pengaruh positif, seperti yang di kemukakan oleh Luthans (2006) dalam Sumbayak (2017) bahwa karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi dan menjalin hubungan yang aktif dan saling mendukung maka akan mencapai tujuan organisasi yang baik dan karyawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi menyebabkan mereka akan bekerja, bersikap, berperilaku baik dan bekerja keras untuk organisasinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Widiutami, dkk. (2017). Dalam penelitian tersebut dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi dengan objek penelitian yang dilakukan di Lembaga Pengkreditan Desa di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini juga akan meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut, namun terdapat sebuah perbedaan pada objek penelitiannya yaitu di kantor kecamatan yang ada di kabupaten Jepara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah untuk penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal terhadap Kecurangan Akuntansi?

2. Bagaimanakah pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecurangan Akuntansi?
3. Bagaimanakah pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan Akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka peneliti menentukan empat tujuan penelitian, yaitu:

1. Memberikan bukti empiris pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal terhadap Kecurangan Akuntansi.
2. Memberikan bukti empiris pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecurangan Akuntansi.
3. Memberikan bukti empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap Kecurangan Akuntansi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang Pengauditan, khususnya masalah Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Kepuasan Kerja terhadap Kecurangan Akuntansi.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Penelitian bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di

Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran kepada instansi terkait, berkenaan dengan peningkatan Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan komitmen organisasi pegawai untuk mengurangi Kecurangan Akuntansi.

b. Manfaat Penelitian bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sebuah kesempatan untuk menerapkan ilmu yang terkait dengan Pengauditan yang telah didapat di bangku kuliah.

c. Manfaat Penelitian bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang akan datang.